

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	42
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	45
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	60
3.3 Program dan Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
BAB IV PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisikan rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2021. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2021 menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2020 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, mengantisipasi permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja DP2KBP3A Tahun 2020 merupakan komitmen bersama semua pihak yang didalamnya disusun secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya sehingga arah pembangunan akan menjadi jelas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2020 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang terkait yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 29);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri disusun dengan maksud :

- Menyediakan acuan resmi guna menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah
- Sebagai pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2021 yaitu :

- Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kediri kedalam rencana kegiatan pembangunan
- Menciptakan sinergisitas pembangunan Kabupaten Kediri dengan Program dan kegiatan DP2KBP3A
- Menciptakan efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang ada untuk mendukung pembangunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika dan Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri telah melaksanakan 13 program dan 17 kegiatan. Tingkat capaian kinerja dari kegiatan tahun 2019 dinilai dari :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang meliputi indikator output (Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang meliputi indikator (Input, Output dan Outcome), target, realisasi dan Persentase capaian kinerja
- b. Dari keberhasilan dan ketidak berhasilan serta faktor yang mempengaruhi
- c. Hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi hambatan melalui faktor-faktor penyebab serta pemecahannya.

Indikator yang dimaksud di atas adalah indikator kinerja kegiatan, yaitu ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat lebih akurat dan objektif.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator input, outcome, benefit, dan impact. Input adalah semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk melaksanakan kegiatan, terutama adalah dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, selain itu juga berupa SDM, peralatan, metode dan bahan/materi.

Output adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas bangunan dan barang yang dibeli/dibangun, frekuensi acara/aktifitas yang dilaksanakan, dan jumlah orang/lembaga yang telah diberi pembinaan.

Outcome merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari pihak yang dibina, atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli dan sebagainya.

Capaian sasaran strategis DP2KBP3A dalam tahun 2019 dapat di lihat pada tabel berikut :

*Tabel II.1
Data Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Tahun 2019*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya	Persentase peserta KB aktif	27,07	35,82	132,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	
	partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	MKJP				
		Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB	80,60	80,85	95,57
			BKR	83,98	83,19	99,06
			BKL	79,88	74,34	93,06
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	100	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja DP2KBP3A selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga

- Indikator Persentase peserta KB aktif MKJP

Jumlah peserta KB aktif MKJP sebanyak 77.035 peserta dari peserta KB aktif keseluruhan sebanyak 215.033 akseptor. Realisasi persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 35,82%, target yang telah ditetapkan sebesar 27,07%. atau capaian kinerja tahun 2019 sebesar 132,32 %. Dapat dijelaskan bahwa peserta KB aktif dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP dan Implant) telah melebihi target yang telah ditetapkan. Peserta KB aktif MKJP yang tinggi akan berpengaruh pada terjadinya drop out pemakaian alokon KB, hal ini disebabkan karena penggunaan metode MKJP minimal selama 3 tahun. Kenaikan capaian kinerja MKJP ini diupayakan melalui kegiatan KIE, Konseling maupun pelayan KB khususnya pelayanan MKJP serta melalui pelayanan pendekatan kepada masyarakat.

Data capaian peserta KB Aktif MKJP dapat dilihat dari laporan Pengendalian Lapangan (Rek.kab. F1/Dal). Data peserta KB aktif MKJP secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.2
Data Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	PESERTA KB AKTIF MKJP					JUMLAH	%
			IUD	MOW	MOP	IMPLANT			
1	SEMEN	8.023	817	346	17	1.013	2.193	27,33	
2	MOJO	9.896	2.077	473	20	1.098	3.668	37,07	
3	KRAS	7.794	608	585	12	1.053	2.258	28,97	
4	NGADILUWIH	9.306	1.266	643	12	947	2.868	30,82	
5	KANDAT	9.666	1.035	772	11	1.072	2.890	29,90	
6	WATES	11.952	1.821	913	21	1.537	4.292	35,91	
7	NGANCAR	5.681	953	421	6	1.060	2.440	42,95	
8	PUNCU	8.237	606	635	32	1.045	2.318	28,14	

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	PESERTA KB AKTIF MKJP					
			IUD	MOW	MOP	IMPLANT	JUMLAH	%
9	PLOSOKLATEN	10.750	1.636	1.077	86	686	3.485	32,42
10	GURAH	10.753	1.771	896	79	747	3.493	32,48
11	PAGU	5.121	410	319	4	522	1.255	24,51
12	GAMPENGREJO	3.713	414	353	10	532	1.309	35,25
13	GROGOL	5.852	857	417	20	526	1.820	31,10
14	PAPAR	7.440	706	607	13	520	1.846	24,81
15	PURWOASRI	7.935	781	316	27	248	1.372	17,29
16	PLEMAHAN	8.343	1.537	410	12	793	2.752	32,99
17	PARE	13.252	3.441	769	66	3.250	7.526	56,79
18	KEPUNG	10.797	2.107	677	22	2.364	5.170	47,88
19	KANDANGAN	5.508	844	347	11	635	1.837	33,35
20	TAROKAN	10.427	2.939	719	24	1.454	5.136	49,26
21	KUNJANG	5.255	916	411	15	339	1.681	31,99
22	BANYAKAN	7.825	1.120	354	5	682	2.161	27,62
23	RINGINREJO	6.854	1.051	397	44	835	2.327	33,95
24	KAYEN KIDUL	6.554	1.530	584	16	962	3.092	47,18
25	NGASEM	9.679	1.904	730	27	1.076	3.737	38,61
26	BADAS	8.420	1.420	1.200	10	1.479	4.109	48,80
	KABUPATEN	215.033	34.567	15.371	622	26.475	77.035	35,82

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian tertinggi peserta KB MKJP pada tahun 2019 adalah kecamatan Pare (56,79%) sedang yang terendah adalah kecamatan Purwoasri (17,29%).

- Kelompok Bina Keluarga Balita

Jumlah PUS anggota kelompok BKB sebanyak 15.877 peserta PUS anggota kelompok BKB yang ber KB sebanyak 12.757 peserta, atau sebesar 80,85%. Tahun 2019 target kinerja sebesar 84,60%, sehingga persentase capaian kinerja PUS anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang berKB sebesar 95,57%. Capaian persentase PUS kelompok BKB masih belum tercapai sesuai harapan dikarenakan kegiatan pelayanan KIE, Konseling yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi masyarakat untuk ber KB.

Adanya anggota PUS di kelompok BKB diharapkan akan berpidah metode berKB menjadi peserta KB MKJP, sehingga mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak balitanya tumbuh kembang secara optimal.

- Kelompok Bina Keluarga Remaja

Di Tahun 2019, jumlah PUS anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 3.319 peserta, dari jumlah tersebut, yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berKB sebanyak 2.761 atau sebesar 83,19%. Jika target kinerja yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 83,98%, maka capaian kinerja sebesar 99,06%, atau mendekati 100 % sehingga upaya KIE dan konseling perlu ditingkatkan.

Dengan banyaknya PUS anggota BKR yang berKB ini diharapkan keluarga PUS yang memiliki remaja memiliki kesempatan dan waktu dan pengetahuan yang cukup untuk mendidik dan membimbing anak remajanya dengan baik, agar anak-anak remaja mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

- Kelompok Bina Keluarga Lansia

Jumlah PUS anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 3.523 peserta dari jumlah tersebut 2.619 telah menjadi peserta kelompok BKL yang berKB, atau sebesar 74,34%. Dari target kinerja yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 79,88% maka prosentase capaian kinerja PUS anggota kelompok BKL yang berKB sebesar 93,06% dari target yang telah ditetapkan, capaian ini masih dibawah target yang telah ditetapkan maka kegiatan KIE dan konseling pada kegiatan BKL perlu ditingkatkan. Kegiatan BKL ini bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia mengenai perawatan dan pendampingan terhadap lansia agar menjadi lansia tangguh. Data Jumlah PUS anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang berKB bersumber dari Rek.Kab.F/I/Dal 13 yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.3
Data PUS Anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang BerKB
Di Kabupaten Kediri Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	PUS ANGGOTA BKB			PUS ANGGOTA BKR			PUS ANGGOTA BKL		
		Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB
1	SEMEN	466	443	95,06	76	51	67,11	77	38	49,35
2	MOJO	305	282	92,46	80	65	81,25	89	64	71,91
3	KRAS	980	702	71,63	36	24	66,67	199	87	43,72
4	NGADILUWIH	991	676	68,21	348	245	70,40	496	357	71,98
5	KANDAT	231	187	80,95	73	56	76,71	114	85	74,56
6	WATES	612	479	78,27	98	81	82,65	71	55	77,46
7	NGANCAR	401	339	84,54	41	33	80,49	29	19	65,52
8	PUNCU	748	654	87,43	207	200	96,62	84	75	89,29
9	PLOSOKLATEN	740	607	82,03	211	169	80,09	195	68	34,87
10	GURAH	1579	1247	78,97	147	114	77,55	197	151	76,65
11	PAGU	564	483	85,64	121	92	76,03	139	112	80,58
12	GAMPENGREJO	554	403	72,74	72	58	80,56	86	65	75,58
13	GROGOL	488	417	85,45	155	116	74,84	111	92	82,88
14	PAPAR	898	886	98,66	48	42	87,50	238	209	87,82
15	PURWOASRI	310	271	87,42	179	164	91,62	114	89	78,07

NO.	KECAMATAN	PUS ANGGOTA BKB			PUS ANGGOTA BKR			PUS ANGGOTA BKL		
		Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB
16	PLEMAHAN	394	254	64,47	41	30	73,17	103	61	59,22
17	PARE	1112	1083	97,39	391	340	86,96	410	384	93,66
18	KEPUNG	490	409	83,47	93	79	84,95	101	97	96,04
19	KANDANGAN	262	215	82,06	70	55	78,50	24	24	100,00
20	TAROKAN	278	260	93,53	102	84	82,35	66	58	87,88
21	KUNJANG	259	215	83,01	24	14	58,33	80	66	82,50
22	BANYAKAN	920	823	89,46	440	397	90,23	119	100	84,03
23	RINGINREJO	1370	760	55,47	68	47	69,12	204	143	70,10
24	KAYEN KIDUL	467	356	76,23	122	105	86,07	115	83	72,17
25	NGASEM	144	113	78,47	42	36	85,71	12	9	75,00
26	BADAS	314	193	61,46	74	64	86,49	50	28	56,00
	TOTAL	15877	12757	80,35	3319	2761	83,19	3523	2619	74,34

1. Sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Indikator Sasaran dari meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dihitung dari Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A. Dari jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam tahun 2019 sebanyak 79 kasus yang dilaporkan di P2TPA yang artinya seluruhnya telah selesai ditangani dengan baik.

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi ditahun 2019 yang dilaporkan dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu 26,6%, jika tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan dan telah ditangani sebanyak 58 kasus, ditahun 2019 naik menjadi 78 kasus.

Adapun data kasus kekerasan di Kabupaten Kediri tahun 2019 yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel II.4
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak
Ditangani P2TP2A Kabupaten Kediri Tahun 2019*

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani
1	SEMEN	2	2
2	MOJO	-	-
3	KRAS	-	-
4	NGADILUWIH	-	-
5	KANDAT	10	10
6	WATES	-	-
7	NGANCAR	2	2
8	PUNCU	2	2
9	PLOSOKLATEN	2	2
10	GURAH	-	-
11	PAGU	4	4
12	GAMPENGREJO	2	2
13	GROGOL	-	-
14	PAPAR	2	2
15	PURWOASRI	4	4

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani
16	PLEMAHAN	2	2
17	PARE	16	16
18	KEPUNG	-	-
19	KANDANGAN	2	2
20	TAROKAN	2	2
21	KUNJANG	-	-
22	BANYAKAN	4	4
23	RINGINREJO	6	6
24	KAYEN	4	4
25	NGASEM	10	10
26	BADAS	2	2
	JUMLAH TOTAL	78	78

Capain kinerja RPJMD ditahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.5
Capaian Kinerja sasaran Program Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realsasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	- Persentase Unmeet need - Persentase pencapaian peserta KB baru	10,73% 90,00%	10,67% 72,67%	100,56 80,74
2.	Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama	- Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	19,80%	17,77%	110,25
3.	Tersedianya parameter pengendalian penduduk	- Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	100%	100
4.	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga	- Persentase kelompok tribina yang aktif - BKB - BKR - BKL - Persentase kader desa yang aktif	80% 50% 70% 100%	91,71% 89,63% 93,15% 100%	114,64 167,38 133,07 100
5.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	79%	100%	126,58
6.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	- Persentase OPD yang responsif gender - Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	70,00% 85%	83,78% 80%	119,69 94,12

Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran program adalah :

- a. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern dengan indikator
 1. Persentase Unmeet need pada target RPJMD tercapai 100,56% dengan kategori *sangat baik*
 2. Persentase pencapaian peserta KB baru pada target RPJMD tercapai 80,74% dengan kategori *baik*. Pencapaian untuk KB Baru diutamakan pada pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang untuk menekan angka kegagalan dan dropout program KB.
- b. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama dengan indikator persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun 2019 pada taeket RPJMD tercapai 110,25% dengan kategori *sangat baik*
- c. Tersedianya parameter pengendalian penduduk dengan indikator Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga pada taerget RPJMD tercapai 100% dengan kategori *sangat baik*
- d. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga dengan indikator
 1. persentase kelompok tribina yang aktif pada target RPJMD tercapai BKB 114,64%, BKR 167,38% dan BKL 133,07% dengan kategori *sangat baik*
 2. persentase kader desa yang aktif pada target RPMJD tercapai 100% dengan kategori *sangat baik*
- e. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A dari target RPJMD tercapai 126,58% degan kategori *sangat baik*
- f. Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator :
 1. Persentase OPD yang responsif gender dari target RPJMD tercapai 119,69% denga kategori *sangat baik*
 2. Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan dari target RPJMD tercapai 94,12% dengan kategori *sangat baik*

Dari hasil diatas dapai disimpulkan bahwa capaian kinerja terhadap RPJMD selama tahun 2019 sangat baik dan berhasil.

Capaian Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

Pagu Anggaran Program Keluarga Berencana tahun 2019 sebesar Rp.8.423.220.000 (delapan milyar empat ratus duapuluh tiga juta dusratus duapuluh ribu rupiah), sedangkan realisasi penyerapan sebesar Rp. 6.038.865.761 (enam milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus enampuluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atau 71,69%.

- Indikator *outcome* : Persentase Unmet need
- Target : 10,73%
- Realisasi : 10,67%
- Realisasi Capaian : 100,56%

Target capaian unmeet need telah dapat tercapain 100,56% dikarenakan adanya kesadaran Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya Program KKBPK melalui kesertaan ber KB, namun masih perlu mendapatkan perhatian pada pernikahan baru terutama pasangan yang belum waktunya memiliki anak disebabkan karena alat reproduksinya belum sehat. Selain itu unmet need ini menjadi perhatian terutama pada usia yang memiliki resiko kehamilan seperti melahirkan pada usia 40 tahun keatas. Guna menekan tingginya unmeet need perlu adanya kegiatan KIE yang lebih efektif lagi. Data capaian unmet need untuk kabupaten Kediri sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II.6

DATA CAPAIAN UNMET NEED KABUPATEN KEDIRI 2019

NO	KECAMATAN	PUS	UNMET NEED			
			IAT	TIA	TOTAL	%
1	SEMEN	11.105	469	528	997	8,98
2	MOJO	14.260	633	760	1.393	9,77
3	KRAS	10.657	610	542	1.152	10,81
4	NGADILUWIH	12.859	745	735	1.480	11,51
5	KANDAT	12.624	600	576	1.176	9,32
6	WATES	16.243	693	674	1.367	8,42
7	NGANCAR	7.931	518	335	853	10,76
8	PUNCU	11.423	529	495	1.024	8,96
9	PLOSOKLATEN	15.299	739	860	1.599	10,45
10	GURAH	14.689	801	772	1.573	10,71
11	PAGU	7.074	317	394	711	10,05
12	GAMPENGREJO	5.105	179	310	489	9,58
13	GROGOL	8.194	431	375	806	9,84
14	PAPAR	9.917	338	884	1.222	12,32
15	PURWOASRI	11.064	637	758	1.395	12,61
16	PLEMAHAN	11.416	573	850	1.423	12,46
17	PARE	18.565	1.218	1.106	2.324	12,52
18	KEPUNG	14.582	876	941	1.817	12,46
19	KANDANGAN	7.283	554	581	1.135	15,58
20	TAROKAN	13.573	961	465	1.426	10,51
21	KUNJANG	7.200	393	340	733	10,18
22	BANYAKAN	11.126	539	502	1.041	9,36
23	RINGINREJO	9.642	710	386	1.096	11,37
24	KAYEN KIDUL	8.903	326	345	671	7,54
25	NGASEM	13.167	746	775	1.521	11,55
26	BADAS	11.840	601	539	1.140	9,63
	TOTAL	295.741	15.736	15.828	31.564	10,67

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Keluarga Berencana :

1. *Pelayanan Advokasi dan KIE KB*

Anggaran kegiatan pelayanan advokasi dan KIE KB tahun 2019 sebesar Rp. 285.840.000 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), realisasi sebesar Rp. 272.490.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 95%.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kelompok kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a) Sub kegiatan Safari KB dengan indikator

- Indikator output : Jumlah akseptor yg terlayani pada kegiatan safari KB
- Target : 6000 akseptor
- Realisasi : 6780 akseptor
- Realisasi Capaian : 133,00%

Capaian kegiatan Safari KB sebesar 133,00% dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Safari KB dilakukan sebanyak 6 kali, bertempat di klinik-klinik KB baik pemerintah maupun swasta. Kegiatan pelayanan KB pada meliputi pelayanan IUD dan Implant. Tujuan kegiatan Safari KB adalah mempercepat perolehan Peserta KB baru serta memberikakan pelayanan KB gratis pada masyarakat.

b) Sub kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

- Indikator output : Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan KIE
- Target : 26 kecamatan
- Realisasi : 26 kecamatan
- Realisasi Capaian : 100%

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kegiatan berupa:

- a. Pemberian Informasi kepada masyarakat melalui ledang ataupun pemutaran film/hiburan kepada masyarakat dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan sebanyak 36 kali di kecamatan dan SLG
- b. bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- c. Promosi KKBPK melalui pemasangan baliho sebanyak 3 tempat. dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Rapat koordinasi lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam rangka membangun kepedulian masyarakat pada program KKBPK di Kabupaten Kediri melalui kesepakatan ditentukan bersama.

c) Sub kegiatan Promosi melalui KHIBA dengan indikator :

- Indikator output : Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi
- Target : 400 orang
- Realisasi : 400 orang
- Capaian : 100%

Kegiatan yang dilaksanakan melalui sosialisasi 1000 hari pertama Kehidupan (HPK) pada para ibu dilaksanakan bekerja sama dengan Kodim 0809 Kediri. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap 1000 HPK dalam rangka menekan stunting serta kematian Ibu, Bayi dan Balita.

2. *Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana*

Anggaran kegiatan *Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana* sebesar Rp. 1.140.410.000 (satu milyar seratus empat puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Realisasi sebesar Rp. 1.073.667.800 (satu milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus enampuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau 94%.

a. Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana melalui dana DAK guna mendukung program KKBPK dengan indikator :

- Indikator output : jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan
- Target : Balai Penyuluhan 2 unit, LCD 8 Unit, PC 8 unit
- Realisasi : Balai Penyuluhan 2 unit.LCD 8 Unit, PC 8 unit
- Capaian : 100%

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KB merupakan sarana untuk mendukung tercapainya program KB yang meliputi pembangunan balai penyuluh KB di 2 kecamatan (Kecamatan Kras dan Kandangan) dan sarana pengolahan data bagi balai penyuluhan KB yang terdiri dari PC sebanyak 8 unit dan LCD sebanyak 8 unit.

3. *Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)*

Anggaran kegiatan *Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)* sebesar Rp. 6.996.970.000 (enam milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) realisasi Rp. 4.692.707.961 (empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus enampuluh satu rupiah) atau 67%

- Indikator output : Jumlah kecamatan yang menerima bantuan operasional KB dan biaya distribusi alkon
- Target : 26 kecamatan
- Realisasi : 26 kecamatan
- Capaian : 100%

Batuan operasional KB digunakan untuk bantuan biaya operasional kegiatan di balai penyuluh KB di 26 kecamatan serta biaya untuk pendistribusian alat kontrasepsi ke klinik KB

ii. **Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Pagu Anggaran Program *Kesehatan Reproduksi Remaja* sebesar Rp. 263.800.000 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terealisasi Rp. 245.300.000 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau 92,99%

- Indikator *outcome* : Persentase perkawinan perempuan usia < 20 th
- Target : 19,80
- Realisasi : 17,77%
- Capaian : 110,25%

Untuk persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun tercapai 110,25% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya kerja sama dengan berbagai pihak baik Kemenag maupun sekolah-sekolah sehingga dapat menekan angka perkawinan di usia dini. Adapun data Perkawinan Perempuan usia Kurang dari 20 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel II.7
Jumlah Perkawinan Perempuan Usia kurang dari 20 tahun

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN		
		< 20 Th	Total	%
1	SEMEN	17	259	6,56
2	MOJO	112	405	27,65
3	K R A S	61	337	18,10
4	NGADILUWIH	78	525	14,86
5	KANDAT	92	336	27,38
6	WATES	80	394	20,30
7	NGANCAR	22	338	6,51
8	PUNCU	105	421	24,94
9	PLOSOKLATEN	68	346	19,65
10	GURAH	98	392	25,00
11	P A G U	46	215	21,40
12	GAMPENGREJO	40	170	23,53
13	GROGOL	59	262	22,52
14	P A P A R	10	343	2,92
15	PURWOASRI	64	298	21,48
16	PLEMAHAN	20	386	5,18
17	PARE	116	526	22,05
18	KEPUNG	100	555	18,02
19	KANDANGAN	82	261	31,42
20	TAROKAN	18	513	3,51
21	KUNJANG	48	200	24,00
22	BANYAKAN	73	277	26,35
23	RINGINREJO	51	280	18,21
24	KAYEN KIDUL	29	271	10,70
25	NGASEM	60	445	13,48
26	BADAS	86	448	19,20
	KABUPATEN	1635	9.203	17,77

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Reproduksi Remaja antara lain sebagai berikut

1. *Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)*

Anggaran kegiatan *Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)* sebesar Rp. 253.800.000 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu) terealisasi Rp. 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau 92,85%

a) Sub Kegiatan Advokasi dan KIE KRR

- indikator output : Jumlah kelompok PIK Remaja/mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR
- Target : 70 kelompok
- Realisasi : 70 kelompok
- Capaian : 100%

Pelaksanaan kegiatan Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Kediri. Kegiatan ini berupa :

- pelatihan kepada pendidik dan konselor sebaya, Rapat koordinasi pada pembina PIK Remaja.
- pemberian advokasi pada 4 kecamatan yang prosentase perkawinan usia dini masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan advokasi seperti desa Besowo kecamatan Kepung dilakukan Advokasi untuk penerbitan Perdes tentang Usia Pernikahan.

b) Sub kegiatan Pembinaan Saka Kencana

- Indikator output : Jumlah Saka Kencana yang dibina
- Target : 20 saka
- Realisasi : 20 saka
- Capaian : 100%

Pelaksanaan sub kegiatan pembinaan saka kencana dilaksanakan dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Kediri melalui kegiatan Kemah Saka Kencana di taman wisata Ubalan Kecamatan Plosoklaten yang diikuti 26 saka kencana dengan jumlah 260 anggota.

c) Sub Fasilitas Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa

- Indikator output : Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitas
- Target : 600 orang
- Realisasi : 600 orang
- Capaian : 100%

Pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kelompok PIK Remaja/Mahasiswa juga dilaksanakan dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Kediri melalui kegiatan lomba-lomba: Life skill, Lomba Pidato, lomba pembuatan layanan Iklan, Lomba Duta Genre sebagai upaya meningkatkan kreatifitas remaja kearah yang positif. Pada ujung kegiatan dilaksanakan Temu PIK Remaja se Kabupaten Kediri dengan agenda Jalan dan Senam bersama di Simpang Lima Gumul yang diikuti oleh 600 anggota PIK Remaja/Mahasiswa.

2. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*

Anggaran kegiatan *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan* sebesar Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 5.000.000 atau 100%

- Indikator output : Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR
- Target : 20 kelompok
- Realisasi : 26 kelompok
- Capaian : 130,00%

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan di 26 kecamatan adalah melakukan monev pada kelompok PIK Remaja/Mahasiswa agar lebih meningkatkan kegiatannya dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa maupun mahasiswa terhadap kesehatan reproduksi remaja

iii. **Program Pelayanan Kontrasepsi**

Pagu Anggaran program Pelayan Kontrasepsi sebesar Rp. 1.740.320.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 791.604.874 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratis tujuh puluh empat rupiah) atau 53,84%

- Indikator *outcome* : Persentase pencapaian peserta KB baru
- Target : 90%
- Realisasi : 72,67%
- Capaian : 80,74%

Indikator persentase pencapaian peserta KB, dari target yang ditetapkan di tahun 2019 sebesar 90%, baru tercapai sebesar 80,74%, namun demikian secara kualitas meningkat, yang ditunjukkan dari data capaian MKJP yang meningkat, hal ini dapat menekan angka drop out peserta KB.

Belum optimalnya capaian Indikator Capaian peserta KB antara lain karena:

- keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, rasio tenaga penyuluh dengan desa belum optimal, rata-rata seorang PKB memiliki wilayah kerja sebanyak 6 desa, bahkan lebih, sehingga koordinasi kurang intensif.
- kurangnya KIE, sehingga pemahaman masyarakat masih kurang terhadap pentingnya ber KB,

Data Peroleh Peserta KB Baru Tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel II.8
Data Pencapaian Peserta KB baru Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PPM SM	IUD	MOW	MOP	KND	IMPLAN	SUNTIK	PIL	TOTAL SM	% PPM SM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEMEN	1.394	120	17	2	7	239	819	38	1.242	89,1%
2	MOJO	1.600	180	8	-	-	222	600	154	1.164	72,8%
3	KRAS	1.333	56	34	1	3	318	514	22	948	71,1%
4	NGADILUWIH	2.000	138	66	3	10	326	899	88	1.530	76,5%
5	KANDAT	1.762	77	30	1	21	166	1.164	97	1.556	88,3%
6	WATES	2.200	179	59	2	55	298	1.075	429	2.097	95,3%
7	NGANCAR	994	84	21	-	6	191	353	33	688	69,2%
8	PUNCU	950	105	55	1	38	298	220	13	730	76,8%
9	PLOSOKLATEN	2.100	222	45	1	6	232	753	145	1.404	66,9%
10	GURAH	1.878	219	67	3	12	196	845	39	1.381	73,5%
11	PAGU	1.010	84	26	-	16	90	378	72	666	65,9%
12	GAMPENGREJO	810	56	22	1	17	84	280	68	528	65,2%
13	GROGOL	1.316	74	32	-	32	130	560	152	980	74,5%
14	PAPAR	1.575	95	34	4	5	163	402	203	906	57,5%
15	PURWOASRI	1.488	132	39	-	1	205	613	125	1.115	74,9%
16	PLEMAHAN	1.750	115	43	-	1	160	1.095	57	1.471	84,1%
17	PARE	2.958	505	182	1	-	359	746	24	1.817	61,4%
18	KEPUNG	1.250	149	33	2	15	236	565	54	1.054	84,3%
19	KANDANGAN	1.750	132	22	1	16	83	469	98	821	46,9%
20	TAROKAN	1.900	202	14	-	39	276	877	218	1.626	85,6%
21	KUNJANG	1.250	58	19	-	-	77	329	11	494	39,5%
22	BANYAKAN	1.259	47	6	-	2	180	730	117	1.082	85,9%
23	RINGINREJO	1.376	277	16	3	19	212	454	50	1.031	74,9%
24	KAYEN KIDUL	1.135	167	25	2	14	219	326	31	784	69,1%
25	NGASEM	1.760	197	97	-	2	288	592	55	1.231	69,9%
26	BADAS	1.461	223	39	1	12	305	243	86	909	62,2%
	KABUPATEN	40259	3.893	1.051	29	349	5.553	15.901	2.479	29.255	72,67%

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Pelayanan kontrasepsi adalah :

a. *Pelayanan konseling KB*

Anggaran *Pelayanan konseling KB* sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) terealisasi Rp. 58.604.000 (lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah) atau 59,24%

- Indikator output : Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling
- Target : 5380 akseptor
- Realisasi : 5793 akseptor
- Capaian : 170,68%

Kegiatan ini dilaksanakan kepada calon peserta KB dengan pemberian konseling, sehingga calon peserta KB dapat menentukan metode berKB yang akan dipilih. Pilihan metode ber KB oleh akseptor ini penting, karena diharapkan dapat menekan angka drop out dan efek samping berKB. Jumlah akseptor yang dikonseling sebanyak 5.793 merupakan peserta metode KB MKJP.

b. Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Anggaran *Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* sebesar Rp. 1.371.320.000 (satu milyar tigaratus tujuh puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 732.960.874 (tujuh ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 53,45%

- Indikator output : Jumlah akseptor KB MOW yang dilayani
- Target : 8.671 akseptor
- Realisasi : 10.526 akseptor
- Capaian : 121,39%

Kegiatan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ini merupakan pelayanan KB khususnya untuk IUD, MOW, MOP dan Implant, yang dilaksanakan baik secara mandiri, perorangan maupun pelayanan secara masal. Pelaksanaan pelayanan KB MOW dilaksanakan di RSUD Pare dan RS SLG dengan jumlah akseptor sebanyak sebanyak 396 akseptor. Sedangkan untuk pelayanan KB MOP dilaksanakan 6 kali, dengan jumlah akseptor sebanyak 39 akseptor. Sedang untuk pelayanan IUD dan Implant dilaksanakan di Klinik-klinik KB baik Pemerintah maupun Swasta.

Untuk menjangkau daerah yang sulit atau jauh dari tempat pelayanan klinik KB, upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan mobil unit penerangan dan pelayanan dengan mobil unit pelayanan KB yang dimiliki oleh DP2KBP3A. Tahun 2019 telah dilakukan di 12 desa pada 12 kecamatan. Jumlah akseptor yang terlayani : IUD sebanyak 108 akseptor dan Implant sebanyak 313 akseptor.

Untuk mendukung meningkatnya pelayanan KB MKJP, DP2KBP3A memanfaatkan momentum kegiatan Hari Jadi Kediri, Safari Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes, Hari jadi IBI, Hari Jadi IDI, Hari Keluarga Nasional, TNI Menunggal KB-Kes dan Hari Ibu.

iv. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Pagu Anggaran Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga sebesar Rp. 64.089.000 (enam puluh empat juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terealisasi Rp. 58.969.000 (lima puluh delapan juta gembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) atau 92,01%

- Indikator *outcome* : Persentase kelompok tribina yang aktif
- Target : BKB 80%, BKR 50%, BKL 70%
- Realisasi : BKB 91,71%, BKR 89,63%, BKL 93,15%
- Capaian : BKB 114,64%, BKR 167,38%, BKL 133,07%

Capaian program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan makin banyaknya proporsi kelompok tri bina keluarga diharapkan upaya meningkatkan ketahanan keluarga makin mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak bagi keluarga yang memiliki anak balita, mendidik anak remaja secara benar dan menjaga lansia agar tidak menjadi beban keluarga bagi keluarga yang memiliki anak remaja atau lansia. Kegiatan Tri bina diharapkan capaian terus meningkat aktifitasnya sehingga menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat. Data capaian kelompok kegiatan Tri Bina yang aktif adalah sebagai berikut :

Tabel II.9
DATA KELOMPOK TRI BINA YANG AKTIF KEGIATAN TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	BINA KELUARGA BALITA			BINA KELUARGA REMAJA			BINA KELUARGA LANSIA		
		KELOM POK	KELP. AKTIF	%	KELOM POK	KELP. AKTIF	%	KELOM POK	KELP. AKTIF	%
1	SEMEN	9	9	100	2	2	100	2	2	100
2	MOJO	10	10	100	4	4	100	4	4	100
3	KRAS	16	16	100	3	3	100	16	15	93,75
4	NGADILUWIH	16	16	100	16	13	81,25	16	16	100
5	KANDAT	10	10	100	2	2	100	12	12	100
6	WATES	16	16	100	9	9	100	9	9	100
7	NGANCAR	2	2	100	3	0	0,00	2	2	100
8	PUNCU	15	15	100	6	6	100	8	8	100
9	PLOSOKLATEN	21	21	100	6	6	100	6	6	100
10	GURAH	25	25	100	12	12	100	11	11	100
11	PAGU	15	15	100	5	5	100	5	5	100
12	GAMPENGREJO	13	13	100	2	2	100	8	8	100
13	GROGOL	12	11	91,67	3	3	100	7	7	100
14	PAPAR	17	17	100	3	2	66,67	15	15	100
15	PURWOASRI	18	18	100	18	18	100	17	17	100
16	PLEMAHAN	11	11	100	6	6	100	4	4	100
17	PARE	13	13	100	11	11	100	12	12	100
18	KEPUNG	12	12	100	2	2	100	10	8	80,00
19	KANDANGAN	12	12	100	7	7	100	9	9	100
20	TAROKAN	10	10	100	10	8	80,00	10	8	80,00
21	KUNJANG	8	8	100	1	1	100	2	2	100
22	BANYAKAN	13	13	100	8	8	100	7	7	100
23	RINGINREJO	20	20	100	11	3	27,27	18	12	66,67
24	KAYEN KIDUL	11	11	100	9	9	100	10	10	100
25	NGASEM	6	6	100	1	1	100	2	2	100
26	BADAS	10	10	100	4	4	100	4	4	100
	TOTAL	341	340	99,71	164	147	89,63	226	215	95,13

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga meliputi :

1. *Peningkatan Ketahanan Keluarga*

Anggaran kegiatan peningkatan ketahanan keluarga sebesar Rp. 64.089.000 terrealisasi Rp. 58.969.000 atau 92,01%

a. Sub kegiatan Revitalisasi kader BKL

- Indikator output : Jumlah kader yang mengikuti revitalisasi
- Target : 104 orang
- Realisasi : 104 orang
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan revitalisasi kader BKL telah tercapai sebesar 100% Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan kader tri bina agar lebih berperan aktif di kegiatan tri bina. Dari jumlah 104 kader yang mendapatkan kegiatan revitalisasi yang bisa hadir sejumlah 104 orang.

b. Sub kegiatan Pembinaan Tenaga pendamping bina keluarga

- Indikator outcome : Persentase tenaga pendamping yang dibina
- Target : 90%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 111,11%

Capaian kegiatan pembinaan tenaga pendamping bina keluarga telah tercapai sebesar 111,11% . Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan pembina tri bina agar lebih berperan aktif di kegiatan tri bina. Jumlah Pembina kelompok tri bina yang hadir dalam pembinaan sebesar 100%.

c. Sub kegiatan Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)

- Indikator outcome : Jumlah kartu kembang anak yang dicetak
- Target : 4100 lembar
- Realisasi : 4100 lembar
- Capaian : 100%

Kegiatan Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) telah dilaksanakan tercapai 100% dengan mencetak KKA sebanyak 4100 lembar. KKA ini digunakan mendukung kegiatan Bina Keluarga Balita yaitu untuk mengetahui perkembangan balita baik afektif, kognitif maupun psikomotor.

v. **Program Pengendalian Penduduk**

Pagu Anggaran Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp. 429.500.000 terealisasi Rp. 303.157.500 atau 70,58%

- Indikator *outcome* : Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian program pengendalian penduduk tercapai 100% yang artinya bahwa pada setiap desa atau kelurahan telah tersedia rekapitulasi data keluarga. Data ini merupakan data dasar untuk perencanaan program dan kegiatan KKB.

Kegiatan yang mendukung program pengendalian penduduk adalah :

1. *Penyusunan Perencanaan Pengendalian Penduduk*

Anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengendalian Penduduk sebesar Rp. 257.350.000 (duaratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) realisasi Rp. 184.557.000 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus limapuluh tujuh ribu rupiah) atau 71,71%

- Indikator output : Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun
- Target : 2 dokumen
- Realisasi : 2 dokumen
- Capaian : 100%

Kegiatan yang mendukung penyusunan perencanaan pengendalian penduduk pelaksanaannya melalui sub kegiatan :

- Penyusunan dokumen analisa kependudukan 1 dokumen
- Rapat koordinasi dengan Tim koalisi kependudukan Kabupaten Kediri guna memperoleh kesepakatan dalam pembangunan kependudukan
- Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dengan menggunakan jasa konsultan GDPKB dari Unair
- Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilaksanakan pada 11 sekolah setingkat SLTA guna memasukan kegiatan perencanaan pendidikan kependudukan pada sekolah
- Pelatihan pendataan keluarga yang untuk 3.275 kader di pedesaan.

2. *Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga*

Anggaran kegiatan Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga sebesar Rp. 172.150.000 (seratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 118.600.500 (seratus delapan belas juta enam ratus ribu lima ratus rpiah) atau 68,89%

- Indikator output : Jumlah dokumen laporan KKBPK
- Target : 2 dokumen
- Realisasi : 2 dokumen
- Capaian : 100%

Kegiatan Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga dengan indikator Jumlah dokumen laporan KKBPK telah tercapai sebesar 100% yaitu dengan tersusunnya jumlah dokumen laporan tahunan KKBPK 2018 dan laporan KKBPK semester I tahun 2019.

vi. **Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan**

Pagu Anggaran Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan sebesar Rp. 1.154.966.000 (satu milyar seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu) terealisasi Rp. 907.958.000 (Sembilan ratus tujuh juta sembiain ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 78,61%

- Indikator *outcome* : Persentase kader desa yang aktif
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan dengan indikator Persentase kader desa yang aktif tercapai 100% dari target. Bahwa Kader desa yang ada adalah PPKBD dan Sub PPKBD sampai saat ini masih aktif membantu pelaksanaan program KKBPK di Kabupaten Kediri

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan*

Anggaran Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan sebesar Rp. 1.154.966.000 (satu milyar seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 907.958.000 (Sembilan ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 78,61%

a) Sub kegiatan Pembinaan Lini Lapangan

- Indikator output: Persentase lini lapangan yang diperdayakan
- Target : 90%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 111,11%

Capaian Lini lapangan yang mendapatkan pembinaan sebesar 111,11% dari target. Kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan pembinaan Petugas KB tentang hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan untuk perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kinerjanya. Jumlah PKB 60 yang mengikuti pembinaan sejumlah 60 orang. Pembinaan juga di berikan pada kader desa PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 3.275 orang juga diberikan bantuan biaya operasional

b) Sub kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

- Indikator output : Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan
- Target : 104 orang
- Realisasi : 104 orang
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan indikator Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan tercapai 100% dari target. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan kepada pembina UPPKS yang diikuti 104 orang di 26 kecamatan

vii. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak**

Pagu Anggaran Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak sebesar Rp. 79.818.500 (tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) terealisasi Rp. 66.438.500 (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 83,24%

- Indikator outcome : Persentase OPD yang responsif gender
- Target : 70%
- Realisasi : 83,78%
- Capaian : 119,69%

Capaian program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak tercapai sebesar 119% dari target hal ini diketahui bahwa belum semua skpd responsif gender. Diharapkan bahwa semua SKPD kedepannya responsif gender Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan*

a. Sub kegiatan Advokasi dan Evaluasi Pengarus utamaan Gender (PUG)

- Indikator output : Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG
- Target : 40%
- Realisasi : 83,78%
- Capaian : 209,46%

Capaian kegiatan advokasi dan evaluasi Pengarus utamaan Gender (PUG) tercapai sebesar 209,46% dari target. Kegiatan ini berupa fasilitasi dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung kepada pengarus utamaan gender.

b. Sub kegiatan Pembinaan PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)

- Indikator output : Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)
- Target : 15 kelompok
- Realisasi : 26 kelompok
- Capaian : 173,33%

Capaian sub kegiatan pembinaan PUSPA tercapai sebesar 173,33% dari target. Kegiatan ini melalui sosialisasi dan pembinaan pada 26 kelompok perempuan guna pembentukan PUSPA di Kabupaten Kediri.

viii. **Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan**

Pagu Anggaran Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan sebesar Rp. 266.706.250 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp. 47.414.388 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan) atau 17,78%

- Indikator *outcome* : Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A
- Target : 79%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 126,58%

Capaian program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A tercapai sebesar 126,58% dari target.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kediri sejumlah 78 kasus seluruhnya telah dapat diselesaikan. Data Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan dapat dilihat di bawah ini :

Tabel II.10
DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG TELAH DISELESAIKAN TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan
1	SEMEN	2	2
2	MOJO	-	-
3	KRAS	-	-
4	NGADILUWIH	-	-
5	KANDAT	10	10
6	WATES	-	-
7	NGANCAR	2	2
8	PUNCU	2	2
9	PLOSOKLATEN	2	2
10	GURAH	-	-
11	PAGU	4	4
12	GAMPENGREJO	2	2
13	GROGOL	-	-
14	PAPAR	2	2
15	PURWOASRI	4	4
16	PLEMAHAN	2	2
17	PARE	16	16
18	KEPUNG	-	-
19	KANDANGAN	2	2
20	TAROKAN	2	2
21	KUNJANG	-	-
22	BANYAKAN	4	4
23	RINGINREJO	6	6

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan
24	KAYEN	4	4
25	NGASEM	10	10
26	BADAS	2	2
	JUMLAH TOTAL	78	78

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak*

a) Sub kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak

- Indikator output : Persentase kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A
- Target : 80%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 125%

Capaian kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dengan indikator Persentase kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A tercapai 125% dari target. Jumlah kasus (5 kasus) KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A telah dapat ditangani seluruhnya

b) Sub kegiatan pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)

- Indikator output : Persentase ABH yang didampingi
- Target : 80%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 125%

Capaian kegiatan Pendampingan anak bermasalah dengan hukum dengan indikator Persentase ABH yang didampingi tercapai 125% dari target. Jumlah Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Kediri pada tahun 2019 sebanyak 5 anak dan semuanya telah mendapatkan pendampingan. Data masing-masing ABH dari kecamatan Plosoklaten, Papan, Purwoasri, Pare dan Ngasem.

c) Sub Kegiatan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

- Indikator output : Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi
- Target : 15 orang
- Realisasi : 25 orang
- Capaian : 133,33%

Capaian kegiatan Koordinasi PPT dengan indikator Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi tercapai 133,33% dari target. Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 25 orang dari unsur Dinsos, Polresta Kediri, Polres Kediri, RS Bhayangkara, RSUD Pare, Diknas, LSM Suar, Kejaksaan, Badan Pemasarakta (Bapas), Kemenag, Dinkes dan DP2KBP3A.

d) Sub Kegiatan Rapat Gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)

- Indikator output : Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA
- Target : 25 orang
- Realisasi : 25 orang
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan rapat gugus tugas KLA dengan indikator Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA tercapai 133,33% dari target. Jumlah anggota yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 25 orang dari unsur Dinsos, Polresta Kediri, Polres Kediri, BNN, Diskominfo, Diknas, LSM Suar, Kejaksaan, Bapas, Kemenag, Pengadilan Agama, Dinas Pariwisata, DLH, Disnaker, Disdukcapil, Kearsipan, Bappeda, Dinkes, DPMPD, Bag Hukum, DPM-STP, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bag. Perekonomian dan DP2KBP3A.

ix. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**

Pagu Anggaran Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar Rp. 368.595.250 (tigaratus enam puluh delapan juta limaratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terealisasi Rp. 315.505.000 (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima ribu rupiah) atau 85,60%

- Indikator *outcome* : Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan
- Target : 85%
- Realisasi : 80%
- Capaian : 94,12%

Capaian program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan tercapai sebesar 94,12% dari target. Hal bahwa bahwa kelompok wanita yang ada di Kabupaten Kediri belum semuanya berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan*

a. Sub Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

- Indikator output : Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan
- Target : 8 kelompok
- Realisasi : 6 kelompok
- Capaian : 85%

Capaian kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan dengan indikator Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan tercapai 85% dari target. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pameran produk dari kelompok usaha wanita yang telah ditunjuk pada acara pekan budaya di Gumul dan pameran pembangunan, kelompok usaha wanita yang mengikuti pameran ada 6 kelompok

b. Sub kegiatan hari kesatuan gerak PKK, KB dan hari Ibu

- Indikator output : Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu
- Target : 500 orang
- Realisasi : 800 orang
- Capaian : 160%

Capaian kegiatan penunjang hari kesatuan gerak PKK, KB dan hari Ibu dengan indikator Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu tercapai 160% dari target. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan senam bersama, tabur bunga di TMP, Bhaksos, Pelayan KB dan puncak acara Resepsi Hari Ibu di desa Pagung kecamatan Semen kegiatan ini diikuti oleh 800 orang peserta.

c. Sub kegiatan Peran wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

- Indikator output : Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS
- Target : 80 orang
- Realisasi : 80 orang
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan Peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dengan indikator Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS tercapai 100% dari target. Kegiatan ini membina sebanyak 80 orang kelompok P2WKSS di desa Keniten Kecamatan Mojo

d. Sub kegiatan bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)

- Indikator output : Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi
- Target : 40 orang
- Realisasi : 70 orang
- Capaian : 175%

Capaian kegiatan Bimbingan teknis Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) dengan indikator Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi tercapai 175% dari target. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian ketrampilan kepada 6 kelompok usaha wanita dengan pelatihan pembuatan souvenir hantaran pernikahan yang dilaksanakan di pendopo kabupaten Kediri

x. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pagu Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 478.666.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu) terealisasi Rp. 383.478.281 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu duaratus delapan puluh satu rupiah) atau 80,11%

- Indikator *outcome* : cakupan layanan administrasi perkantoran
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian indikator program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100% dari target. Hal ini terpenuhi kebutuhan dan ketersediaan pelayanan yang mendukung kegiatan perkantoran selama tahun 2019.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Pelaksanaan administrasi perkantoran*

Anggaran kegiatan Pelaksanaan administrasi perkantoran sebesar Rp. 139.626.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 128.111.686 (seratus dua puluh delapan juta seratus sebelas jribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) atau 91,75%

- Indikator output : Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran
- Target : 12 dokumen
- Realisasi : 12 dokumen
- Capaian : 100%

Capain kegiatan ini sebesar 100% dengan jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran 12 domuken selama satu tahun.

2. *Koordinasi dan konsultasi kelembagaan*

Anggaran kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan sebesar Rp. 339.040.000 (tiga raus tiga puluh Sembilan juta empat puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 255.366.595 (duaratus lima puluh lima juta tiga ratus enampuluh enam lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau 75,32%

- Indikator output : Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan
- Target : 2 dokumen
- Realisasi : 2 dokumen
- Capaian : 100%

- Kegiatan ini tercapai 100% berupa tersusunnya 2 dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan selama satu tahun yang dibuat per semester

xi. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 256.284.000 (duaratus lima puluh enam juta duaratus delapan puluh empat ribu) terealisasi Rp. 172.222.699 (seratus tujuh puluh dua juta duaratus duapuluh dua rupiah) atau 67,20%

- Indikator *outcome* : cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian indikator program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dari target. Hal ini terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran selama tahun 2019. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung kegiatan :

1. Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur

- Indikator output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
- Target : Printer 10, Komputer 4, Kendaraan 96, AC 4 dan Mebeler 6
- Realisasi : Printer 10, Komputer 4, Kendaraan 96, AC 4 dan Mebeler 6
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan ini sebesar 100% dengan terpeliharanya dengan baik kendaraan roda dua 101 unit dan roda 4 sebanyak 7 unit serta perlengkapan kantor yang lain melalui pemeliharaan sukucadang, servis dan pemenuhan pajak kendaraan.

xii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu Anggaran program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 210.350.000 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 74.323.000 (tujuh puluh empat juta tiga ratus duapuluh tiga ribu rupiah) atau 35,33%

- Indikator *outcome* : persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar 100% bahwa kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya

1. *Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur*

- Indikator output : Prosentase pegawai yang mendapatkan pelatihan / pembinaan
- Target : 90%
- Realisasi : 95%
- Capaian : 106%

Capaian kegiatan ini sebesar 106% bahwa 95% pegawai yang ada mendapatkan pembinaan. Pembinaan yang telah dilaksanakan melalui pembinaan : pelatihan penyusunan karya ilmiah, pelatihan aplikasi SIGA, penyusunan angka kredit, serta guna memotivasi kerja dan meningkatkan wawasan dilakukan pembinaan melalui kegiatan out bond serta studi banding ke kabupaten Malang dan Madiun.

xiii. **Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Pagu Anggaran Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi Rp. 70.493.000 (tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau 99,99%

- Indikator *outcome* : tingkat ketepatan waktu pelaporan capain kinerja dan keuangan
- Target : 100%
- Realisasi : 100%
- Capaian : 100%

Capaian indikator kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% sistem pelaporan kinerja dan keuangan selama tahun 2019 di DP2KBP3A sudah terpenuhi

Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. *Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD*

Anggaran kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD sebesar Rp. 70.500.000 terealisasi Rp. 70.493.000 atau 99,99%

- Indikator output : Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun
- Target : 4 dokumen
- Realisasi : 4 dokumen
- Capaian : 100%

Capaian kegiatan ini sebesar 100%. Dengan sudah tersusunnya 4 dokumen laporan yang meliputi laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2018, laporan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2018 Rencana Kerja tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 serta terbayarnya honorarium pengelola keuangan di Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri

2. Permasalahan dan Solusi

Beberapa keberhasilan yang dicapai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri selama kurun waktu sampai dengan bulan Desember tahun 2019. Telah dijumpai berbagai permasalahan yang di hadapi, selanjutnya perlu diupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa permasalahan yang tengah dihadapi di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya usia kawin pertama isteri umur di bawah 20 th

Solusi :

- Meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja
- Pendekatan kepada tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam Pendewasaan Usia Perkawinan.
- Membentuk kelompok Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja di tingkat SMP, SMA dan Mahasiswa

2. Presentase Unmetneed cukup tinggi

Solusi :

- Meningkatkan KIE kepada calon akseptor dengan pemutaran film, iklan pendek dengan Mobil Penerangan (Muyan).
- Meningkatkan Pelayanan ke daerah yang sulit terjangkau oleh akseptor dengan mobil Pelayanan (Muyan)
- Perbaiki data dasar KKBPK

3. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Solusi :

- Pembentukan forum anak yang bisa mewakili aspirasi anak tingkat kecamatan sampai tingkat desa.
- Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan : GOPTKI, HIMPAUDI, Disdikpora, Kemenag, PKK, Dharma Wanita, Dinkes, Polres/Polresta, Muslimat, Fatayat, Aisyiah, Psikolog.
- Koordinasi dengan Dinas kesehatan dan RSUD kabupaten, Polres/Polresta pelatihan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga P2TP2A
- Meningkatkan koordinasi di Tim Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Berupaya pembentukan Satuan Tugas penanggulangan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai pada tingkat desa.

Hasil pelaksanaan Program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri tahun 2019 dan sebagai acuan kegiatan ditahun berikutnya yaitu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.11

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2018
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Keluarga Berencana	Persentase Unmeet need	10,71%	12,27%	10,75%	11,49%	93,12%	10,71%	10,75%	100,00
	1 Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB	24000 aksp	14504 akseptor	6000 aksp	8507 aksp	141,78%	6000 aksp	3215 aksp	52,81
		Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi	240 orang	60 kec	60 orang	60 orang	100%	60 orang	0	54,67
		Jumlah peserta Rapat Koordinasi KKBPK	1200 orang	400 orang	90 orang	90 orang	100%	400 orang	90 orang	27,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	4 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang diadakan	12 gedung	8 gedung	3 gedung	3 gedung	100,00%	2 gedung	0	57,14
	5 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB))	Jumlah kecamatan yang menerima bantuan operasional KB dan biaya distribusi alkon	26 kec.	26 kec	26 kecamatan	26 kecamatan	100,00%	26 kecamatan	26 kecamatan	100,00
	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun	19,80%	20,60%	20,00%	19,99%	100,05%	19,90%	19,90%	100,00
	1 Advokasi dan KIE tentang KRR	Jumlah kelompok PIK Remaja / Mahasiswa yg mendapatkan advokasi dan KIE KRR	70 kelpk	70 kelompok	70 kelompok	70 kelompok	100%	70 kelompok	70 kelompok	100,00
		Jumlah Saka kencana yang dibina	20 saka	20 saka	20 saka	20 saka	100,00%	20 saka	20 saka	100,00
		Persentase pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	90%	100%	90%	100,00%	111,00%	90%	90%	100,00
		Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	2400 orang	1200 orang	600 orang	600 orang	100%	600 orang	1800 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR	20 Kelpk	20 kelpk	10 Kelpk	7 kelpk	70,00%	10 kelp	20 kelompok	100,00
	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian peserta KB baru	90%	104,55%	90%	82,89%	92,10%	90%	90,00%	102,76
	1 Pelayanan Konseling KB	Jumlah calon peserta KB yang mendapatkan konseling	19695 aksptor	7125 akseptor	4260 aksptor	429 akseptor	10,07%	5380 akseptor	0	72,55
	2 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB baru MKJP yang dilayani	13.756 Akseptor	12.228 akseptor	1.528 akseptor	720 akseptor	41,12%	8.415 akseptor	13.131 akseptor	95,46
	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase kelompok Tri Bina yang aktif	BKB 85%; BKR 55 %; BKL 75%	BKB 96,56%; BKR 99,40 %; BKL 793,50%	BKB 70%; BKR 50 %; BKL 60%	BKB 99,70%; BKR 98,85 %; BKL 99,11%	BKB 142,43%; BKR 197,70 %; BKL 165,18%	BKB 80%; BKR 50 %; BKL 70%	BKB 80%; BKR 50 %; BKL 70%	100,00
		Jumlah kader yang mendapatkan revitalisasi	312 orang	200 orang	104 orang	104 orang	100%	104 orang	200 orang	36,63
		Persentase tenaga pendamping yang dibina	90%	90%	90%	90%	100%	90,00%	90%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kartu tumbuh anak yang dicetak	12300 lembar	4100 lembar	4100 lembar	4100 lembar	100,00%	11000 lembar	11000	93,02
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100,0%	100,00
	1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	8 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	3 dok	37,50
	2 Penyediaan Informasi Kependudukan dan Keluarga	Jumlah Dokumen laporan KKBPK yang disusun	8 dok	4 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	75,00
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase SKPD yang responsif gender	65%	60%	60%	60%	100,00%	65%	65%	100,00
	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	80%	20%	30%	30%	100%	40%	30%	100,00
	2 Evaluasi PUG	Persentase SKPD yang mendapatkan evaluasi PUG	80%	60%	80%	80%	100,00%	80%	80%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	77%	100%	75%	100%	133,33%	77,0%	77%	100,00
	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Persentase korban KDRT yang difasilitasi	80%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
		Persentase ABH yang didampingi	80%	113%	100%	100%	100,00%	80%	100%	100,00
		Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	60 orang	30 orang	15 orang		0	15 orang	30 orang	50
		Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	100 orang	25 orang	25 orang		0	25 orang	25 orang	25
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	82%	60%	80%	80%	100,00%	82%	82%	100,00
	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan yang diikuti	25 kelompok	10 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	114,28%	8 kelompok	18 kelompok	72

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	1600 orang	800 orang	400 orang	400 orang	100%	400 orang	1200 orang	75
		Jumlah perempuan mendapatkan pembinaan P2WKSS	240 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100	80 orang	160 orang	75
	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Prosentase kader desa yang aktif	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
	1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Persentase lini lapangan yg diperdagakan	90%	90%	90%	90%	100,00%	90%	90%	100,00
		Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	208 orang	104 orang	52 orang	52 orang	100,00%	52 orang	156 orang	75
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
	1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	58 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100,00%	12 dok	41 dok	70,68
	2 Koordiansi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100,00%	1 dok	3 dok	60
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
	1 Pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan	90%	90%	90%	90%	100,00%	90%	90%	100,00
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	36 bulan	100,00
	1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	25 dok	9 dok	4 dok	4 dok	100,00%	13 dok	15 dok	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Adapun hasil capaian kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.12

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DAERAH
DINAS PENGENDALINAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

No.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	I K K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kesertaan KB aktif MKJP			24,13%	27,07%	28,53%	30%	38,83%	35,43%	28,53%	30%	
2	Persentase Unmeet need	√		10,75%	10,73%	10,71%	10,70%	11,49%	11,28%	10,71%	10,70%	
3	Persentase pencapaian peserta KB Baru			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	85,70%	31,89%	90,00%	90,00%	
4	Prosentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun			19,90%	19,80%	19,70%	19,60%	18,84%	18,35%	19,70%	19,60%	
5	Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB			BKB 84,50%; BKR 83,86%; BKL 79,86%	BKB 84,66%; BKR 84,07%; BKL 80,24%	BKB 84,83%; BKR 84,29%; BKL 80,62%	BKB 85%; BKR 84,50%; BKL 81%	BKB 81,38%; BKR 83,53%; BKL 79,31%	BKB 81,68%; BKR 83%; BKL 74,40%	BKB 84,83%; BKR 84,29%; BKL 80,62%	BKB 85%; BKR 84,50%; BKL 81%	
6	Persentase kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif			BKB 80%; BKR 50%; BKL 70%	BKB 80%; BKR 50%; BKL 70%	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	BKB 100%; BKR 97,12%; BKL 100%	BKB 100%; BKR 99,94%; BKL 93,81%	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	

No.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	I K K	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<i>Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan</i>	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	<i>Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A</i>			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	<i>Prosentase SKPD yang responsip gender</i>			65%	70%	75%	80%	90%	90%	75%	80%	
10	<i>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A</i>			77%	79%	81%	83%	100%	100%	81%	83%	
11	<i>Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan</i>			82,00%	85,00%	86,00%	87,00%	80%	80%	86,00%	87,00%	
12	<i>Persentase Kader desa yang aktif</i>			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	

Dari hasil kinerja pada table diatas ada 12 indikator kinerja di tahun 2018 yang sesuai Renstra 2016-2021 sudah tercapai 8 indikator atau sebesar 66,67% dari target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 4 indikator yang belum tercapai yaitu persentase peserta KB Baru, Persentase Unmeet need, Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB dan Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana

- a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Kepala Badan 1 (satu) orang
2. Sekretaris Badan 1 (satu) orang
3. Dibawah Sekretaris ada 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - Kepala sub bagian penyusunan program
 - Kepala sub bagian keuangan
 - Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala seksi, yang terdiri dari :
 - Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi
 - Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala sub bidang, yang terdiri dari :
 - Kepala Seksi ketahanan keluarga
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala sub bidang, yang terdiri dari :
 - Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk
 - Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PP dan PPA) 1 (satu) orang, yang dibawahnya ada 2 (dua) orang kepala seksi, yang terdiri dari :
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber daya manusia tersebut telah mencukupi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat secara riil juga didukung oleh sumber daya manusia yang berada dilapangan yang terdiri 63

petugas penyuluh KB. Meskipun dari segi standar pelayanan minimal masih kurang dari rasio, yaitu 1 petugas membawahi 4-5 desa (standar SPM 1 petugas : 2 desa) namun demikian selalu diupayakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

b. Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1) Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal;
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang cukup sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan maksimal;
- c. Kurangnya dukungan anggaran pada beberapa kegiatan;
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengendalian penduduk serta perlindungan perempuan dan anak, sehingga masih diperlukan upaya yang optimal informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan perlindungan perempuan dan anak.

2) Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- a. Koordinasi yang belum menyeluruh sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik,
- b. Pemahaman aparaturnya terhadap tugas dan fungsi belum maksimal,
- c. Inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan tugas dan fungsi aparaturnya masih kurang,
- d. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah

- a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui pembangunan berkelanjutan akan membutuhkan waktu yang lama,
- b. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat lambat dan berakibat kepercayaan pada pemerintah akan menurun,

4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

a. Tantangan

- Kurangnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana/PKB (rasio PKB dibandingkan jumlah desa/kelurahan) serta kualitasnya (pengetahuan dan keterampilan)
- Belum optimalnya fungsi organisasi DP2KBP3A

- b. Peluang
 - Struktur organisasi yang jelas (Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 tahun 2016) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri
 - Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
 - Adanya team work yang kuat dalam pelaksanaan tugas
 - Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi
- c. Isu-isu strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - a. Adanya kasus tindak kekerasan KDRT, trafficking;
 - b. Perlunya lembaga perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Peran serta perempuan dalam kegiatan usaha masih rendah;
 - d. PUS ingin ber KB tapi belum ber-KB masih tinggi;
 - e. Masih tingginya perkawinan usia < 20
 - f. Data mikro kependudukan yang perlu diperbaiki

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kediri RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD kabupaten Kediri dalam penyusunannya dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan.

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang telah disusun. Sehingga diharapkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung kinerja DP2KBP3A.

Selama Tahun 2021 telah disusun rencana anggaran dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri guna mendukung capaian kinerja yang akan dicapai. Adapun Rencana Program dan Kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri selama kurun waktu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.13
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Keluarga Berencana		Persentase Unmeet need	10,71%	2.764.988	Keluarga Berencana		Persentase Unmeet need	10,71%	2.856.288	
	1 Pelayanan Advokasi dan KIE KB	Kab Kediri	Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB	6000 aksp	11.6200	1 Pelayanan Advokasi dan KIE KB	Klinik	Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB	6000 aksp	11.6200	
		Kab Kediri	Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi	60 orang			Kecamatan	Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi	60 orang		
		Kab Kediri	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi KKBPK	300 orang				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi KKBPK	300 orang		
	2 Operasional Balai Penyuluhan KB	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan bokb	26 kec	1.558.338	2 Operasional Balai Penyuluhan KB	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan bokb	26 kec	1.558.338	DAK
	3 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Kab Kediri	Jumlah balai penyuluh KB yang di perbaiki	3 gedung balai	1.090.450	3 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Kab Kediri	Jumlah balai penyuluh KB yang di perbaiki	3 gedung balai	1.090.450	DAU DAK
			Jumlah sarana gudang alokon yang diadakan	3 unit				Jumlah sarana gudang alokon yang diadakan	3 unit		
2	Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun	19,70%	110.000	Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun	19,70%	161.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kab Kediri	Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR	70 kelpk	110.000	1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kab Kediri	Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR	70 kelp	156.000		
		Kab Kediri	Jumlah pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	120 orang			Kab Kediri	Jumlah pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	120 orang			
		Kab Kediri	Jumlah Saka kencana yang dibina	20 saka			Kab Kediri	Jumlah Saka kencana yang dibina	20 saka			
		Kab Kediri	Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	600 orang			Kab Kediri	Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	600 orang			
		Kab Kediri	Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR	20 kelp			Kab Kediri	Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR	20 kelp			
3	Pelayanan Kontrasepsi		Persentase capaian peserta KB baru	90%	1.678.412,5	Pelayanan Kontrasepsi		Persentase capaian peserta KB baru	90%	1.584.623		
1	Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Kab Kediri	Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	9500 aksp	1.678.412,5	1 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Kab Kediri	Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	9500 aksp	105.500		
		Klinik	Jumlah akseptor KB baru yang dilayani	2240 aksp			Klinik	Jumlah akseptor KB baru yang dilayani	2240 aksp			
2	Operasional Distribusi Alkon	Klinik	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alkon	112 fakses	92.288	3 Operasional Distribusi Alkon	Klinik	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alkon	112 fakses	92.288	DAK	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase kelompok Tri Bina yang aktif	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	163.774	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase kelompok Tri Bina yang aktif	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	2.517.174	
	1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kab Kediri	Jumlah Kader yang direvitalisasi	104 orang	163.774	1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kab Kediri	Jumlah Kader yang direvitalisasi	104 orang	163.774	
		Kab Kediri	Persentase tenaga pendamping yang dibina	90%			Kab Kediri	Persentase tenaga pendamping yang dibina	90%		
		Kab Kediri	Jumlah KKA yang dicetak	11000 lb			Kab Kediri	Jumlah KKA yang dicetak	11000 lb		
		desa	Jumlah desa stunting yang dibina	20 desa			desa	Jumlah desa stunting yang dibina	20 desa		
	2 Operasional Penggerakan di Kampung KB	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melakukan penggerakan kampung KB	26 kecamatan	2.353.400	2 Operasional Penggerakan di Kampung KB	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melakukan penggerakan kampung KB	26 kecamatan	2.353.400	DAK
5	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan		Prosentase kader desa yang aktif	100%	2.178.106,5	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan		Prosentase kader desa yang aktif	100%	3.036.327	
	1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Kab Kediri	Persentase lini lapangan yg diperdayakan	90%	2.178.106,5	Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Kab Kediri	Persentase lini lapangan yg diperdayakan	90%	1.238.927	
		Kab Kediri	Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	140 orang			Kab Kediri	Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	140 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab Kediri	Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	3275 orang			Kab Kediri	Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	3275 orang		
2	Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Desa	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	688 orang	1.797.400	Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Desa	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	688 orang	1.797.400	DAK
6	Program Pengendalian Penduduk		Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga		219.500	Program Pengendalian Penduduk		Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga		755.464	
1	Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Kab Kediri	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	2 dok	84.500	1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Kab Kediri	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	2 dok	84.500	
2	Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Kab Kediri	Jumlah Dokumen laporan KKBPK yang disusun	2 dok	135.000	2 Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Kab Kediri	Jumlah Dokumen laporan KKBPK yang disusun	2 dok	85.000	
		Sekolah	Jumlah sekolah yang mempunyai data pojok kependudukan	20 sekolah			Sekolah	Jumlah sekolah yang mempunyai data pojok kependudukan	20 sekolah		
3	Operasional dukungan KIE dan Manajemen	Kab Kediri	Jumlah kecamatan yang mendapatkan media KIE	26 kec	585.964	3 Operasional dukungan KIE dan Manajemen	Kab Kediri	Jumlah kecamatan yang mendapatkan media KIE	26 kec	585.964	DAK
7	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak		Persentase OPD yang responsif gender	75%	319.056	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak		Persentase OPD yang responsif gender	75%	140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Kab Kediri	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	90%	319.056	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Kab Kediri	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	90%	140.000	
		Kab Kediri	Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)	15 kelp			Kab Kediri	Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)	15 kelp		
		Kab Kediri	Jumlah lembaga yang terlibat dalam BKTl	15 lembaga			Kab Kediri	Jumlah lembaga yang terlibat dalam BKTl	15 lembaga		
8	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%	102.575	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%	114.755	
	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Kab Kediri	Persentase korban KDRT yang difasilitasi	80%	102.575	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Kab Kediri	Persentase korban KDRT yang difasilitasi	80%	114.755	
		Kab Kediri	Persentase ABH yang didampingi	80%			Kab Kediri	Persentase ABH yang didampingi	80%		
		Kab Kediri	Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	15 orang			Kab Kediri	Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	15 orang		
		Kab Kediri	Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	25 orang			Kab Kediri	Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	25 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	86%	179.756,75	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	86%	130.245	
	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Kab Kediri	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	8 kelp	179.756,75	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Kab Kediri	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	8 kelp	130.245	
		Kab Kediri	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	400 orang			Kab Kediri	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	400 orang		
		Kecamatan	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	80 orang			Kecamatan	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	80 orang		
		Kab Kediri	Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	40 orang			Kab Kediri	Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	40 orang		
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	371.720	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	254.000	
	1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	12 dok	230.000	1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	12 dok	169.000	
	2 Koordiansi dan kosultasi kelembagaan	Kab Kediri	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	1 dok	141.720	2 Koordiansi dan kosultasi kelembagaan	Kab Kediri	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	1 dok	85.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	150.900	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	150.900	
	1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kab Kediri	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100%	150.900	1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kab Kediri	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100%	150.900	
12	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	30.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	30.000	
						1 Pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur	Kab Kediri	Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan/ pembinaan	90%	30.000	
13	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	11.500	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 dok	70.500	
	1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kab Kediri	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	4 dok	11.500	1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Kab Kediri	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	4 dok	70.500	
	Jumlah				10.671.656					10.671.656	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja DP2KBP3A didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP2KBP3A selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Masukan dan harapan tersebut adalah sebagai berikut :

Bidang Pengendalian Penduduk

Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan adanya data dan informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi mengenai aspek-aspek yang terkait dengan kependudukan dan KB. Semakin lengkap dan akurat data/informasi kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pengendalian penduduk. Diperlukan tersedianya sarana prasarana untuk data keluarga sehingga data bisa diupdate setiap saat

Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB perlu adanya jaminan ketersediaan alkon sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi secara mudah dan murah. Permasalahan remaja yang berhubungan dengan seksualitas, HIV/AIDs, dan Napza perlu penanganan melalui program kesehatan reproduksi remaja. Kegiatan ini diharapkan bisa mencegah perkawinan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan dan stunting

Bidang Keluarga Sejahtera

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa, yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari provinsi/pusat. Selain itu, dalam hal program ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya pembinaan bagi kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR). Program ketahanan keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan menurunkan stunting

Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam hal peningkatan pendapatan perempuan diharapkan adanya pembinaan melalui berbagai pelatihan keterampilan dan juga bantuan modal usaha. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengharuskan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan, baik dana maupun pendampingan dalam penyelesaian kasus.

Tabel II.14

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANN PERLINDUNGAN ANAK

No	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Keluarga Berencana		Persentase Unmeet need	10,71%	
	1 Pelayanan Advokasi dan KIE KB	Kab Kediri	Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB'	6000 aksp	
		Klinik KB	Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi	60 orang	
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi KKBPK	300 orang	
	2 Operasional Balai Penyuluhan KB	Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan bokb	26 kec	
	3 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Kecamatan	Jumlah balai penyuluh KB yang di perbaiki	3 balai	
		Kab Kediri	Jumlah sarana gudang alokon yang diadakan	3 unit	
2	Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun	19,70%	
	1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kecamatan	Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR	70 kelompok	
			Jumlah pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	120 orang	
			Jumlah Saka Kencana yang dibina	20 saka kencana	
			Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	600 orang	
			Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR	20 kelp	
3	Pelayanan Kontrasepsi		Persentase capaian peserta KB baru	90,00%	
	1 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Kab Kediri	Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	9500 aksp.	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Klinik	Jumlah akseptor KB baru MKJP yang dilayani	2240 aksp.	
	2 Operasional Distribusi Alkon	Klinik	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alkon	112 faskes	
4	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase kelompok Tri Bina yang aktif	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	
	1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kab Kediri	Jumlah Kader yang direvitalisasi	104 orang	
		Kab Kediri	Persentase tenaga pendamping yang dibina	90%	
		Kab Kediri	Jumlah KKA yang dicetak	11000 lembar	
		Kab Kediri	Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	3275 orang	
	2 Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Desa	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	688 orang	
5	Program Pengendalian Penduduk		Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	
	1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Kab Kediri	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	2 dok	
	2 Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Kab Kediri	Jumlah Dokumen laporan KKBPK yang disusun	2 dok	
		Kab Kediri	Jumlah sekolah yang mempunyai data pojok kependudukan	20 sekolah	
	3 Operasional dukungan KIE dan Manajemen	Kab Kediri	Jumlah kecamatan yang mendapatkan media KIE	26 kecamatan	
6	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak		Persentase SKPD yang responsif gender	75%	
	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Kab Kediri	Persentase SKPD yang mendapatkan avokasi dan evaluasi PUG	90%	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kab Kediri	Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)	15 lembaga	
		Kab Kediri	Jumlah lembaga yang terlibat dalam BKTl	15 kelompok	
10	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%	
	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Kab Kediri	Persentase korban KDRT yang difasilitasi	80%	
		Kab Kediri	Persentase ABH yang didampingi	80%	
		Kab Kediri	Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	15 orang	
		Kab Kediri	Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	25 orang	
11	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	85%	
	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Kab Kediri	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	8 kelp	
		Kecamatan	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	400 orang	
		Kecamatan	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	80 orang	
		Kecamatan	Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	40 orang	
12	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan		Prosentase kader desa yang aktif	100%	
	1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Kecamatan /	Persentase lini lapangan yang mendapatkan pembinaan	90%	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Kabupaten			
		Kab Kediri	Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	140 Orang	
			Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	3275 orang	
	2 Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Desa	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	688 orang	
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	
	1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab Kediri	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	12 dok	
	2 Koordiansi dan konsultasi kelembagaan	Kab Kediri	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	1 dok	
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	
	1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Kab Kediri	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	100%	
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	
	1 Pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur	Kab Kediri	Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan	90%	
16	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Kediri	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	
	1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	4 dok	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugasnya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat :

1. Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG),
2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga/LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak,
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak,
4. Meningkatkan Kesertaan Ber KB untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan,
5. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

- a. Tujuan yang berkaitan dengan penyusunan Renja SKPD tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah:
 1. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana
 2. Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
- b. Sasaran dalam penyusunan rancangan Renja SKPD Tahun 2020 meliputi :
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga
 - Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri sesuai Misi Kepala Daerah Kabupaten Kediri yaitu Misi 10 Memantapkan Pembangunan Kependudukan yang meliputi Ketertiban Sistem Pendataan dan Pemberdayaan Warga Masyarakat terutama di Wilayah Pedesaan, khususnya Kaum Perempuan yang didalamnya dengan sasaran pokok salah satunya meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan Meningkatnya partisipasi perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan. Berpedoman pada hal tersebut DP2KBP3A Kabupaten Kediri menyusun rencana Program dan Kegiatan yang searah dan sejalan dengan misi yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Program dan Kegiatan tentunya akan disesuaikan dengan banyak hal diantaranya SDM, Sarana dan prasarana serta kemampuan keuangan daerah. Penyusunan program dan kegiatan juga memperhatikan pada tujuan yang hendak dicapai.

Selama Tahun 2021 DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah menyusun 12 program dan 20 kegiatan. Program dan kegiatan ini dengan sasaran masyarakat maupun kelompok masyarakat seperti akseptor KB, kelompok usaha, kader, kelompok wanita maupun kelompok kegiatan yang berada di masyarakat. Total anggaran yang telah direncanakan Tahun 2021 sebesar **Rp. 10.671.656.000,- (Sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Adapun tabel rencana Program dan Kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2021 adalah :

Tabel III.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2.08	Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.08.2.08.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet need		10,71%	2.798.288.000			10,70%	2.798.288.800
2.08.2.08.01.01.15.12	1 Pelayanan Advokasi dan KIE KB	Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB	Klinik KB	6000 aksp	116.200.000	DAU		6000 aksp	107.820.000
		Jumlah WUS yang terpapar informasi tentang KB dan alat kontrasepsi	Kabupaten	60 orang					
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi KKBPK	Kabupaten	300 orang					
	2 Opreasional Balai penyuluhan KB	Jumlah kecamatan yang menerima bantuan operasional KB	Kecamatan	26 kec	1.558.338.000	DAK		26 kec	1.714.171.800
	3 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Jumlah balai penyuluh KB yang di perbaiki	Kecamatan	3 balai	1.090.450.000	DAK/DAU		25 BKB Kit	1.199.495.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah sarana gudang alokon yang diadakan	3 unit	1 paket		DAK			
2.08.2.08.01.01.16	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun		19,70%	61.600.000			19,60%	67.760.000
2.08.2.08.01.01.16.01	1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah kelompok PIK Remaja / Mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE tentang KRR	Kab Kediri	70 kelp	61.600.000	DAU		70 kelp	67.760.000
		Persentase pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	Kab Kediri	90%				90%	
		Jumlah Saka kencana yang dibina	Kab Kediri	20 saka				20 saka	
2.08.2.08.01.01.17		Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	Kab Kediri	600 orang				600 orang	
2.08.2.08.01.01.17.01	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian peserta KB baru		90,00%	1.032.199.000			90,00%	1.135.418.900
	1 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	Kab Kediri	9500 aksp.	939.911.000	DAU		9500 aksp.	1.033.902.100
		Jumlah akseptor KB baru MKJP yang dilayani	Klinik	2240 aksp.		DAU		2240 aksp.	
	2. Operasional Distribusi Alkon	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alkon	Klinik	112 faskes	92.288.000	DAK		112 faskes	101.516.800
2.08.2.08.01.01.23	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase kelompok Tri Bina yang aktif		BKB 85%; BKR 55 %; BKL 75%	2.445.113.440			BKB 85%; BKR 55 %; BKL 75%	2.689.624.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.2.08.01.01.23.06	1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kader yang direvitalisasi	Kab Kediri	104 orang	91.713.440	APBD		104 orang	100.884.000
		Persentase tenaga pendamping yang dibina	Kab Kediri	90%				90%	
		Jumlah KKA yang dicetak	Kab Kediri	11.000 lb				4100 lembar	
		Jumlah desa stunting yang dibina	Desa	20 desa				20 desa	
	2 Operasional Penggerakan di Kampung KB	Jumlah kecamatan yang melakukan penggerakan kampung KB	Kecamatan	26 kecamatan	2.353.400.000			26 kecamatan	2.588.740.000
2.08.2.08.01.01.26	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga		100%	708.884.000			100%	779.772.400
2.08.2.08.01.01.26.06	1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	Kab Kediri	2 dok	44.570.000	APBD		2 dok	49.027.000
2.08.2.08.01.01.26.07	2 Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Jumlah dokumen Laporan KKBPK yang disusun	Kab Kediri	2 dok	78.350.000	APBD		2 dok	86.185.000
		Jumlah sekolah yang mempunyai data pojok kependudukan	Sekolahan	20 sekolah				20 sekolah	
		3. Operasional dukungan KIE dan Manajemen	Jumlah kecamatan yang mendapatkan media KIE	Kab Kediri	26 Kec	585.964.000			26 kec
2.08.2.08.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	217.714.780			100%	239.486.000
2.08.2.08.01.01.01.30	1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	Kab Kediri	12 dok	170.714.780	APBD		12 dok	187.786.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.2.08.01.01.01.31	2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Kab Kediri	1 dok	47.000.000	APBD		1 dok	51.700.000
2.08.2.08.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	80.800.000			100%	88.880.000
2.08.2.08.01.01.02.55	1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia/terpelihara	Kab Kediri	100%	80.800.000	APBD		100%	88.880.000
2.08.2.08.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	6.440.000			100%	7.084.000
2.08.2.08.01.01.06.21	1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	Kab Kediri	4 dok	6.440.000	APBD		4 dok	7.084.000
2.02	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak								
2.02.2.08.01.01.16	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase SKPD yang responsif gender		75%	70.375.000			80%	77.412.500
2.02.2.08.01.01.16.01	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	Kab Kediri	75%	70.375.000	APBD		80%	77.412.500
		jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk	Kab Kediri	15 kelompok				20 kelompok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Perempuan dan Anak)							
		Jumlah lembaga yang terlibat dalam BKTl	Kab Kediri	15 lembaga				15 lembaga	
2.02.2.08.01.01.17	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A		100%	162.075.000			100%	178.282.500
2.02.2.08.01.01.17.21	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A	Kab Kediri	100%	162.075.000	APBD		100%	178.282.500
		Persentase ABH yang didampingi	Kab Kediri	80%				80%	
		Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	Kab Kediri	15 orang				15 orang	
		Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	Kab Kediri	25 orang				25 orang	
2.02.2.08.01.01.18	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan		86%	104.327.140			87%	114.759.000
2.02.2.08.01.01.18.16	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	Kab Kediri	8 kelp	104.327.140	APBD		114.759.000	114.759.000
		Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Kab Kediri	400 orang				400 orang	
		Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	Kecamatan	80 orang				80 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	Kecamatan	40 orang				40 orang	
2.02.2.08.01.01.20	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Prosentase kader desa yang aktif		100%	3.017.139.640			100%	3.318.853.600
2.02.2.08.01.01.20.04	1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Persentase lini lapangan yang mendapatkan pembinaan	Kab Kediri	90%	1.219.739.640	APBD		90%	1.341.713.600
		Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	Kab Kediri	140 Orang				140 Orang	
		Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	Kab Kediri	3275 orang				3275 orang	
	2 Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	Desa	688 orang	1.797.400.000			688 orang	1.977.140.000
					10.671.656.000				11.738.819.700

Dokumen perangkat daerah seperti rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja SKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran SKPD seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud, menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran, akutansi, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan,

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut, Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri untuk perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 melakukan pemetaan Program dan Kegiatan sesuai Permendagri tersebut. Apapun pemetaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : III.2
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021
SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

NO	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DP2KBP3A																		
1	Bidang Keluarga Berencana	2 0 2 0 0 0 1 8 8 1 1 5	Urusan wajib bukan layanan dasar	Pengendalian Penduduk dan KB	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet need	10,7	persen											
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi	2 0 2 0 0 0 1 1 8 8 1 1 5 2			1 Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan KIE KB	26	Kecamatan	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi program KBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 3 1	60.00 0.000	APB D
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi					Jumlah peserta rapat koordinasi KBPK	300	orang	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kearifan budaya lokal yang mendukung program KBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 2 4 3 1	26.20 0.000	APB D
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi					Jumlah akseptor KB yang terlayani pada kegiatan safari KB	6.00 0	orang	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 1 4	30.00 0.000	APB D

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi				2 Pengadaan Sarana dan prasarana KB	Jumlah Balai penyuluhan KB yang di perbaiki/rehab	3	balai	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana dan prasarana KB yang diadakan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 2 2	700.000.000	DAK	
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi				Jumlah sarana prasarana Gudang alokon yang diadakan	3	unit	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang diadakan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alokon	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 3 6	390.450.000	DAK		
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi				3 Bantuan BOKB	Jumlah kecamatan yang mendapatkan BOKB	26	kecamatan	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KKBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 1 3	585.964.000	DAK (BOKB)	
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi								Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KKBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 1 8	1.558.338.000	DAK (BOKB)	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi								Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alkon	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 3 1	92.28 8.000	DAK (BOKB)	
2	Bidang Pelayanan dan Pembinaan KB	2 0 2 0 0 0 1 8 8 1 1 7			Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Peserta KB Baru	90	persen												
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi	2 0 2 0 0 0 1 0 8 8 1 1 7 9			1 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang dilayani	8.85 0	akseptor	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alkon	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 3 3	808.6 61.00 0	APBD	
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi					Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	8.70 0	orang	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus komplikasi yang terlayani	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alkon	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 3 4	66.25 0.000	APBD	
	Seksi Kesertaan Ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi								Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor KB yang dilayani melalui KB mobil	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alkon	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 3 3 1	55.00 0.000	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Bidang Pelayanan dan Pembinaan KB	2 0 2 0 0 0 1 8 8 1 1 6			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase perkawinan istri usia kurang 20 tahun	19,6	persen												
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi	0 2 0 0 0 1 0 0 8 8 1 1 6 1 8			1 Advokasi dan Komunikasi Informasi edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah kelompok PIK Remaja/mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR	70	kelompok	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah poktan yang melaksanakan kemitraan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase organisasai kemaasyarakatan yang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 2 3	11.60 0.000	APBD	
	Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi					Jumlah Saka Kencana yang dibina	20	saka	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra poktan yang kegiatan poktan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase organisasai kemaasyarakatan yang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 2 2	50.00 0.000	APBD	
4	Bidang Keluarga Sejahtera	2 0 2 0 0 0 2 8 8 1 1 3			Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	(85, 55, 75)	persen												

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Seksi Ketahanan Keluarga	2 0 2 0 0 0 2 0 8 8 1 1 3 6			1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah kader yang direvitalisasi	104	orang	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola yang diorientasi/dilatih	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah poktan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 1 3	5.875.000	APBD	
	Seksi Ketahanan Keluarga				Persentase tenaga pendamping yang dibina		90	persen	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang diorientasi/dilatih	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 1 4	5.875.000	APBD	
	Seksi Ketahanan Keluarga				Jumlah KKA yg dicetak		11.000	lembar	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah desa yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 1 7	54.650.000	APBD	
	Seksi Ketahanan Keluarga				Jumlah desa stunting yang dibina		20	desa	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok tri bina yang aktif (BKB, BKR, BKL)	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 4 1 2	25.313.440	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	Bidang Pengendalian Penduduk	2 0 2 0 0 0 2 8 8 1 1 6			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100	persen												
	Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk	2 0 2 0 0 0 2 8 8 1 1 6 6			1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen analisa kependudukan	2	dokumen	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 2 1 1	33.375.000	APBD	
	Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk					Jumlah dokumen perencanaan KKBPK	1	Dokumen	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil KKBPK yang disusun	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 2 2 3	11.195.000	APBD	
	Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk					Jumlah peserta sosialisasi KKBPK	120	orang												
	Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga	2 0 2 0 0 0 2 8 8 1 1 6 6			2 Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Persentase kader yang dilatih pendataan	90	persen												
	Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga					Jumlah dokumen laporan KKBPK	4	dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 2 2 1	10.050.000	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga					Jumlah sekolah yang mempunyai data pokok kependudukan	20	sekolahan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 2 2 2	47.90 0.000	APBD	
	Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengendalian lapangan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 2 2 3	1.797. 400.000	DAK (BOKB)	
	Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga								Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR Klinik	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 1 4 2 2 4	20.40 0.000	APBD	
6	Bidang Keluarga Sejahtera	2 0 2 0 0 0 2 2 8 1 1 0	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Persentase kader desa yang aktif	100	persen	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah peserta yang mengikuti harganas	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KKBPK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 1 5	79.98 7.000	APBD	
	Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan	2 0 2 0 0 0 2 0 2 8 1 1 0 4			1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Persentase lini lapangan yang mendapatkan pembinaan	90	persen	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Prosentase kader IMP yang aktif	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 2 4	1.139. 752.640	APBD	
	Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan					Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	104	orang	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam	Persentase organisasi masyarakat yang mendukung program KKBPK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 1 0 2.0 0 4 3 4 3	2.353. 400.000	DAK (BOKB)	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	3275	orang			Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
7	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	2 0 2 0 0 0 1 2 8 1 1 6	Urusan Wajib Layanan Dasar	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang responsif gender	90	persen												
	Seksi Pemberdayaan Perempuan	2 0 2 0 0 0 1 2 8 1 1 6 1			1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	80	persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang mendapatkan Advokasi PUG	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 2 1 1	10.000	APBD	
	Seksi Pemberdayaan Perempuan					Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)	15	kelompok	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang mendapatkan Advokasi PUG	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 2 1 3	45.000	APBD	
	Seksi Pemberdayaan Perempuan					Jumlah Dokumen Perda PUG dan PPA	2	dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perda PUG dan PPA	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase OPD yang mendapatkan Advokasi PUG	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 2 1 2	500.000	APBD	
	Seksi Pemberdayaan Perempuan								Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok usaha wanita yang aktif dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 2 2 1	5.000.000	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak	2 0 2 0 0 0 1 2 8 1 1 7			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	83	persen												
	Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak	2 0 2 0 0 0 1 2 2 8 1 1 7 1			1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus KDRT yang difasilitasi Persentase ABH yang didampingi	80 80	persen persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 3 1 1	100.7 50.00 0	APBD	
						Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	15	orang												
						Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	25	orang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 3 2 2	21.25 0.000	APBD	
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang diadakan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang ada	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 3 3 3	2.500. 000	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN			KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 7 1 2	8.525.000	APBD
									Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 7 2 1	3.150.000	APBD
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 7 2 2	23.400.000	APBD
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 7 3 1	2.500.000	APBD

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak	2 0 2 0 0 0 1 2 8 1 1 8			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	87	persen												
	Seksi Pemberdayaan Perempuan	2 0 2 0 0 0 1 1 2 8 1 1 8 6			1 Peran Serta Perempuan dalam pembangunan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	8	kelompok	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENGARUS JUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 2 3 3	10.00	0.000	APBD
	Seksi Pemberdayaan Perempuan				Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	400	orang	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase kesetaraan Gender	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Kelompok Usaha Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Urusan wajib bukan layanan dasar	2 0 0 2.0 0 8 4 1 3	104.2	02.140	APBD
					Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	80	orang		Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS										
					Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	40	orang		Jumlah peserta peringatan hari kartini										
					Jumlah peserta peringatan hari kartini	Jumlah peserta peringatan hari kartini	150	orang												
10	Sekretariat	2 0 2 0 0 0 0 8 8 1 1 1			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100	persen												
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 0 2 0 0 0 0 3 8 8 1 1 1 0			1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	12	dokumen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 3 1	2.400.	000	APBD

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN						
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19	20			
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	0	3	2	8.000.000	APBD	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	0	1	3	5	15.600.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	0	1	3	6	30.000.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	0	1	3	7	54.000.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	0	1	3	8	27.950.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	1	1	3	0	14.072.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	1	1	3	1	6.840.000	APBD
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X	X	0	2.0	1	1	3	2	800.000	APBD

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 1 X 1 3 4	2.000.000	APBD	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 1 X 1 3 5	3.000.000	APBD	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 1 X 1 3 7	10.000.000	APBD	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 0 2 0 0 0 0 3 8 8 1 1 1 1			2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	1 dokumen		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 1 X 1 3 8	30.000.000	APBD	
11	Sekretariat	2 0 2 0 0 0 0 8 8 1 1 2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 persen													
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2 0 2 0 0 0 0 5 8 8 1 1 2 5			1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor / aparatur	Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100 persen		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 3 X 1 3 0	47.000.000	APBD	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 3 X 1 3 4	5.000.000	APBD	
	Sub Bagian Keuangan								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Prosentase dokumen laporan keuangan yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 2 1	5.877.009.500	APBD	

Rencana Kerja DP2KBP3A
Kabupaten Kediri 2021

N O	STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA / RENJA SKPD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
		KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Bagian Keuangan								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Administrasi Keuangan	Prosent se dokumen laporan keuangan yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan layanan dasar	Non urusan	X 0 2.0 0 X 2 2 2	27.95.000	APBD	
	Sub Bagian Keuangan								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan/semesteran	Administrasi Keuangan	Prosentase dokumen laporan keuangan yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 2 7	6.951.390	APBD	
	Sub Bagian Keuangan								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Prosentase dokumen laporan keuangan yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 2 9	6.951.390	APBD	
12	Sekretariat	2 0 2 0 0 0 0 8 8 1 1 6	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	Sub Bagian Penyusunan Program	2 0 2 0 0 0 0 3 8 8 1 1 6 2			1 Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	4	dokumen	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 1 1	3.700.000	APBD	
	Sub Bagian Penyusunan Program								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang diselesaikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaiatan dengan layanan dasar	Non urusan	X X 0 2.0 0 X 1 1 3	2.740.000	APBD	
JUMLAH																		16.548.665.500		

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan tentunya ada suatu tolok ukur untuk mengetahui berhasil tidaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai ukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	30%
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	85,00%
		Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB	84,50%
		Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB	81,00%

Sedangkan sasaran program yang hendak dicapai tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	100%
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Persentase SKPD yang responsif gender	80%
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	87%
4	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	Persentase pencapaian peserta KB Baru	90%
		Unmeet need	10,70%
5	Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama	Persentase perkawinan perempuan usia kurang dari 20 tahun	19,60%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Persentase kelompok BKB yang aktif	85%
		Persentase kelompok BKR yang aktif	55%
		Persentase kelompok BKL yang aktif	75%
		Persentase kader desa yang aktif	100%
7	Tersedianya parameter pengendalian penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2021 Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri melakukan perencanaan program dan kegiatan. Tahun 2021 Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri melaksanakan 12 program 20 kegiatan. Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021 sesuai dengan e-planning adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	Belanja Langsung (Rp)
1	2	3	4
1	Keluarga Berencana	Persentase Unmeet need	2.764.988.000
	1 Pelayanan Advokasi dan KIE KB	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan KIE Jumlah akseptor yang terlayani pada kegiatan safari KB	116.200.000
	2 Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah kecamatan yang mendapatkan bokb	1.558.338.000
	3 Pengadaan sarana dan prasarana KB	Jumlah Balai penyuluhan KB yang diperbaiki	1.090.450.000
		Jumlah saran prasarana gudang alokon yang diadakan	
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun	61.600.000
	1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa yang mendapatkan advokasi dan KIE KRR	61.600.000
		Jumlah pembina PIK Remaja yang mengikuti rakor	
		Jumlah Saka kencana yang dibina	
		Jumlah anggota PIK yang mendapatkan fasilitasi	
		Jumlah kelompok KRR yang mendapatkan monev KRR	
3	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase capaian peserta KB baru	1.032.199.000
	1 Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	Jumlah calon akseptor KB yang dikonseling	939.911.000
		Jumlah akseptor KB baru yang dilayani	
	2 Operasional Distribusi Alkon	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alkon	92.288.000
4	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase kelompok Tri Bina yang aktif	2.445.113.440
	1 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Kader yang direvitalisasi	91.713.440

NO.	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	Belanja Langsung (Rp)
		Persentase tenaga pendamping yang dibina	
		Jumlah KKA yang dicetak	
		Jumlah desa stunting yang dibina	
	2 Operasional Penggerakan di Kampung KB	Jumlah kecamatan yang melakukan penggerakan kampung KB	2.353.400.000
5	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	708.884.000
	1 Penyusunan perencanaan pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan KKBPK yang disusun	44.570.000
	2 Penyediaan informasi kependudukan dan keluarga	Jumlah Dokumen laporan KKBPK yang disusun	78.350.000
		Jumlah sekolah yang mempunyai data pojok kependudukan	
	3 Operasional dukungan KIE dan Manajemen	Jumlah kecamatan yang mendapatkan media KIE	585.964.000
6	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Persentase OPD yang responsif gender	70.375.000
	1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Persentase SKPD yang mendapatkan advokasi dan evaluasi PUG	70.375.000
		Jumlah organisasi wanita yang bergabung dalam PUSPA (Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak)	
		Jumlah lembaga yang terlibat dalam BKTl	
7	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	162.075.000
	1 Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Persentase korban KDRT yang difasilitasi	162.075.000
		Persentase ABH yang didampingi	
		Jumlah anggota PPT yang mengikuti evaluasi PPT	
		Jumlah peserta rapat gugus tugas KLA	
8	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Prosentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan	104.327.140
	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mengikuti pameran hasil karya perempuan	104.327.140
		Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	
		Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan P2WKSS	
		Jumlah anggota kelompok P3EL yang difasilitasi	

NO.	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	Belanja Langsung (Rp)
9	Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan 1 Peningkatan pemberdayaan keluarga dan penggerakan lini lapangan	Prosentase kader desa yang aktif	3.017.139.640
		Persentase lini lapangan yg diperdayakan	1.219.739.640
		Jumlah kader UPPKS yang mendapatkan pembinaan	
		Jumlah Kader yang mendapatkan pembinaan	
2 Operasional pembinaan program KKBPK oleh kader	Jumlah kader yang melakukan pembinaan program KKBPK	1.797.400.000	
10	Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	217.714.780
		Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi perkantoran	170.714.780
		2 Koordiansi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80.8300.000
		Prosentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	80.800.000
12	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70.500.000
		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang disusun	70.500.000
		Total Anggaran	10.671.656.000

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri tidak akan optimal bila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Untuk itu program keluarga berencana dan peningkatan kualitas keluarga yang didukung oleh pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Dukungan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap program Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dibuktikan dengan terlaksananya program dan kegiatan DP2KBP3A tahun 2019 dan tersusunnya rencana kerja Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut masih menemui berbagai kendala, antara lain dana, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana prasarana. Untuk itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program dan kegiatan bisa berhasil secara optimal.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja akan disusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2020

Plt. Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Kediri

dr. NURWULAN ANDADARI. M.MRS
Pembina
NIP. 19681029 200312 2 002

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

